

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kajian Penelitian Terhadulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah ada sejak dahulu dan mempunyai kesamaan dari sisi variable, masalah dan lokus nya terhadap penelitian yang sedang yang saya rancang dan bertujuan untuk meminimalisir kesamaan atau duplikat,

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Dari penjelasan di atas yang berupa tabel dijelaskan berupa penelitian terhadulu yang relevan dengan beberapa garis besar persamaan dan perbedaan namun dibawah ini peneliti menjelaskan secara teoritis yaitu sebagai berikut:

1. Dari penelitian Saka Perdana yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sdnegeri Bekelan, Kulonprogo”

Mempunyai persamaan yaitu

-Memiliki tujuan untuk melihat bagaimana jauh sekolah melaksanakan kebijakan tersebut

-Memfokuskan terhadap 1 sekolah

-Dengan Perbedaan nya yaitu:

-Peneltian Saka perdana memfokuskan terhadap sekolah dasar namun penelitian ini memfokuskan terhadap SMA

-Peneltian Saka Perdana berlokus ke SD di Kulonprogo penelitian ini berlokus di SMA pasundan 2 Kota Cimahi

2. Dari penelitian Nurul Annisa yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar”

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik analisis
1	Saka Perdana	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)di SDNEGERI BEKELAN, KULONPROGO	Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147)	Deskriptif Kualitatif	Triangulasi	Reduksi Data
2.	Nurul Annisa	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR	W.I Jenkins Huber dalam (Solichin Abdul Wahab ,2014: 97)	Analisis deskriptif	obeservasi, wawancara, dokumentasi	Miles dan man
3.	Ebni Sholikhak	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BOS DI SD N REJOSARI DAN SDIT AL-I'TISHAM KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Van Meter dan Van Horn	Deskriptif Kualitatif	Observasi wawancara	Miles dan Huberman

Dari penjelasan di atas yang berupa tabel dijelaskan berupa penelitian terhadulu yang relevan dengan beberapa garis besar persamaan dan perbedaan namun dibawah ini peneliti menjelaskan secara teoritis yaitu sebagai berikut:

1. Dari penelitian Saka Perdana yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sdnegeri Bekelan, Kulonprogo”

Mempunyai persamaan yaitu

-Memiliki tujuan untuk melihat sebagaimana jauh sekolah melaksanakan kebijakan tersebut

-Memfokuskan terhadap 1 sekolah

-Dengan Perbedaan nya yaitu:

-Peneltian Saka perdana memfokuskan terhadap sekolah dasar namun penelitian ini memfokuskan terhadap SMA

-Peneltian Saka Perdana berlokus ke SD di Kulonprogo penelitian ini berlokus di SMA pasundan 2 Kota Cimahi

2. Dari penelitian Nurul Annisa yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar”

-Mempunyai persamaan yaitu:

-Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan kebijakan dana Bos sekolah

-Melakukan Teknik Analisa data yang sama

Mempunyai perbedaan yaitu:

-Penelitian Nurul Annisa berlokasi di kabupaten Kampar naelalmun penelitian ini berlokasi di Kota Cimahi

-Penelitian Nurul Annisa melakukan penelitian ke Dinas Pendidikan

- Tidak berfokus kepada sekolah yang menjalankan BOS

3.Dari Penelitian Ebni Sholikhak yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Bos Di Sd N Rejosari Dan Sdit Al-I’tisham Kabupaten Gunungkidul”

Mempunyai persamaan yaitu:

-Melakukan penelitian ke Sekolah

-melakukan teknik pengumpulan data yang sama

-mempunyai fokus penelitian yang sama

Mempunyai perbedaan yaitu:

-melakukan Penlitian terhadap tingkat Sekolah Dasar

-Melakukan Penelitian terhadap 2 Sekolah

2.1.2 Kajian Terhadap Grand Theori

1.Administrasi

Menurut Alemina Henuk-Kacaribu dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi (2020), secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *administrare*, berarti melayani atau membantu. Administrasi adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerja sama antar dua orang atau lebih. Secara lebih spesifiknya, administrasi bisa dipahami dalam artian sempit dan luas:

Pengertian administrasi dalam arti sempit

Mengutip dari buku Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf (2009) karya Hendi Haryadi, administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis, untuk menyediakan keterangan dan memudahkannya untuk mendapat informasi itu kembali.

Pengertian administrasi dalam arti luas Dalam pengertian luas, administrasi diartikan sebagai aktivitas kerja sama oleh sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerja, sesuai yang telah ditentukan dalam struktur, dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Administrasi dalam artian sempit bisa dikatakan juga sebagai tata usaha. Sedangkan dalam pengertian luas, administrasi mempunyai sejumlah unsur penting, yakni sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas, terstruktur, kegiatan yang runtut untuk mencapai tujuan, serta pemanfaatan berbagai sumber

2.Administrasi Publik

Administrasi publik ialah salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik selalu berhubungan dengan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif.

Selain itu, administrasi publik erat kaitannya dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara dengan baik.

Jika ditinjau secara tata bahasa, administrasi publik mempunyai dua kata penyusun, yaitu administrasi dan publik. Dengan demikian, administrasi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan atau kerja sama sekelompok orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kata publik diartikan sebagai negara dan warga negara atau masyarakat

Dengan begitu, administrasi publik bisa kita artikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan negara, warga negara, atau masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa administrasi publik seperti halnya dengan administrasi lainnya yang dilakukan dengan **tujuan untuk kepentingan umum.**

Marx mendefinisikan administrasi sebagai administrasi ditentukan dengan tindakan yang diambil dalam mencapai tujuan yang telah disadari. Ini merupakan penataan urusan yang sistematis dan penggunaan sumber daya yang

diperhitungkan dengan tujuan untuk mewujudkannya yang diinginkan oleh seseorang/organisasi.

Pendapat selanjutnya datang dari Frederic Lane yang mengartikan administrasi sebagai *pengorganisasian dan pemeliharaan sumber daya manusia serta fiskal untuk mencapai tujuan suatu kelompok*. Definisi yang lengkap untuk administrasi publik bagaimana pun susah untuk dicapai karena banyaknya tugas yang termasuk dalam administrasi publik ini.

Sementara itu, menurut L D White, administrasi publik terdiri atas *semua operasi yang bertujuan guna memenuhi atau menegakkan kebijakan publik*. Di sisi lain, menurut Woodrow Wilson, administrasi publik merupakan penerapan hukum secara terperinci dan sistematis. Bisa juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain merupakan kebijakan, praktik, aturan dan regulasi, serta lain sebagainya.

2.1.3 Kajian terhadap Middle Theori

1.Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008:7)

“ mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 12 Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya Tindakan

2. Pengertian Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman (Sulaiman, 1998:24)

“Sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan (Sulaiman, 1998:24).”

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan adalah keharusan. Perlu diperhatikan bahwa tidak hanya tindakan pemerintah yang menjadi fokus tetapi keterlibatan pemerintah dalam tindakan tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam aksi dapat memiliki dampak besar pada masyarakat sebagai tindakan pemerintah. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan perubahan apa yang dihasilkan

-Thomas R Dye dalam *Understanding Public Policy* (1978)

“menyatakan, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.”

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah pilihan bagi masyarakat yang terlibat dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya

Menurut Abdul Wahab (Yoyon Bachatiar Irianto, 2011: 34)

“kebijakan dapat pula bermakna sebagai tindakan politik, atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau aktor terhadap suatu masalah. Jadi kebijakan dibuat dalam rangka menangani masalah yang ada.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan sebagai keputusan yang dapat berbentuk ungkapan verbal atau tertulis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bersifat memaksa untuk memecahkan masalah dan/atau mencapai tujuan.

3. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Pada satu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil keputusan, namun di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti nilai seperti dominasi dan proses non-developmental (Considine, 1994). Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan kadang kala lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional.

Kebijakan publik yang berkenaan dengan pendidikan yaitu kebijakan yang pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat, mengatur

hubungan kelompok dan organisasi dalam masyarakat, termasuk didalamnya mengatur cara kerja pejabat pemerintah (negara) dalam bidang pendidikan (Arif Rohman, 2001: 52).

Riant Nugroho (2008:35-36) mengatakan

bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut

Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen dalam Riant Nugroho (2008:36)

“ kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.”

Margaret E. Goertz (Riant Nugroho, 2008:37) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran Pendidikan

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang mengatur seluruh aktivitas dalam bidang pendidikan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

4.Kebijakan Pendanaan Pendidikan

Menurut PP No 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pendanaan pendidikan di Indonesia diatur dalam peraturan perundangundangan sebagai berikut.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam BAB XIII pasal 46 sampai pasal 49 dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab terhadap pendanaan pendidikan dalam hal menyediakan sumber pendanaan pendidikan dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan serta pengarahannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan dana pendidikan. Menurut pasal 49 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pendanaan (*funding/ financing*), lebih berkaitan dengan persoalan bagaimana, siapa, dan seberapa mendanai pendidikan. Sistem pendanaan lebih berhubungan dengan siapa yang bertanggungjawab mendanai pendidikan, seberapa besar dana yang harus disediakan, dan bagaimana dana tersebut disalurkan kepada pihak yang akan menggunakan

(Muljani A. Nurhadi, 2011: 1). Jadi pendanaan dapat dikatakan sebagai cakupan aktivitas sebelum dana yang ada digunakan untuk program yang terencana yang menyangkut orang, cara, dan jumlah

1 . Implementasi Kebijakan

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan

yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut.

- Menurut Oktasari (2015:1340),

“ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.”

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45):

(tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

- Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan

“implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil”.

Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan,

“implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan

sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2 .Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

-Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49),

“implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps)”. Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Menurut Hamdi (2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”.

menurut Wibawa (Tahir, 2014:58),

”tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.”

-Nugroho (2014:657) menyatakan,

“implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

-menurut Grindle (Waluyo, 2007:49),

“implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih

dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

-menurut Mulyadi (2015:26),

“implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.

-menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47),

“tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat”.

Dari pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses kegiatan dalam kebijakan yang sangat penting untuk dilakukan karena jika implementasi tidak akan adanya suatu hasil yang didapat oleh organisasi tersebut

2.1.4 Kajian Terhadap Operasional Theori

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

A. Pengertian BOS

Ada beberapa pengertian bantuan operasional sekolah (BOS). BOS merupakan singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan ini diartikan sebagai dana bantuan yang diberikan dari pemerintah untuk

kelancaran kegiatan belajar mengajar. Bantuan ini merupakan keringanan biaya pendidikan yang khusus ditujukan bagi siswa yang tidak mampu.

Semua sekolah dasar dan menengah pertama berhak mendapatkan dana BOS. Program BOS merupakan salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar (Wajar) 9 tahun yang bermutu. Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun

Dalam UU Sisdiknas pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pada ayat 3 juga menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah tingkat SD dan SMP

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai 24 Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis

pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS

B. Tujuan BOS

Secara umum tujuan BOS ialah untuk menanggulangi masalah pemerataan pendidikan. Program BOS membebaskan masyarakat untuk membayar biaya operasional sekolah. Dengan adanya program ini, pemerintah mengharapkan semua anak yang berusia 7-15 tahun menuntaskan pendidikan mereka di jenjang SD dan SMP. Apabila semua anak yang berusia 7-15 tahun dapat menuntaskan belajarnya di SD dan SMP maka dapat dikatakan bahwa pendidikan dasar di Indonesia telah merata dan dapat dinikmati oleh seluruh anak yang berusia 7-15 tahun.

Tujuan BOS pada SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau

- d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tujuan BOS pada SMA/SMALB/SMK untuk:

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar;
- c. mengurangi angka putus sekolah;
- d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affirmative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
- e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
- f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

C.Sasaran dan Besaran Dana BOS

Sesuai Permenkeu No. 246/PMK.07/2012 tentang pedoman umum dan laokasi bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2013, pasal 2 ayat 2 menyebutkan satuan pendidikan dasar penerima BOS meliputi Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah

Menengah Pertama Luar Biasa/ Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT) termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi Indonesia.

Alokasi anggaran BOS tahun 2013 untuk per siswa per tahun yang dihitung dari tanggal 1 Januari 2013. Besaran dana untuk SD/SDLB di kabupaten/kota Rp 580.000,00. Besaran dana untuk SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten/kota Rp 710.000,00. Terdapat perbedaan besaran dana untuk daerah terpencil dan tidak terpencil. Untuk daerah alokasi dana lebih besar yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

nilai satuan BOS tiap sekolah akan berbeda tergantung dari daerah yang dihitung berdasarkan dua metode, yakni:

- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan
- Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Hal tersebut terjadi karena ada sejumlah daerah yang kesulitan mendapatkan bahan baku untuk membangun sekolah maupun penyedia jasa konstruksi. Kondisi tersebut tentu saja akan berdampak terhadap operasional sekolah. Jadi, semakin sulit letak geografisnya, maka semakin tinggi pula IKK. Dengan demikian, nilai satuan dana BOS juga akan lebih tinggi.

Dana yang sudah dicairkan dapat langsung dipergunakan oleh sekolah untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran, seperti membangun sekolah, mengembangkan perpustakaan hingga meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Pemerintah memberikan kewenangan 100 persen kepada pihak sekolah dalam menggunakan dana BOS, namun harus dipergunakan untuk keperluan sekolah dan bukan untuk pribadi.

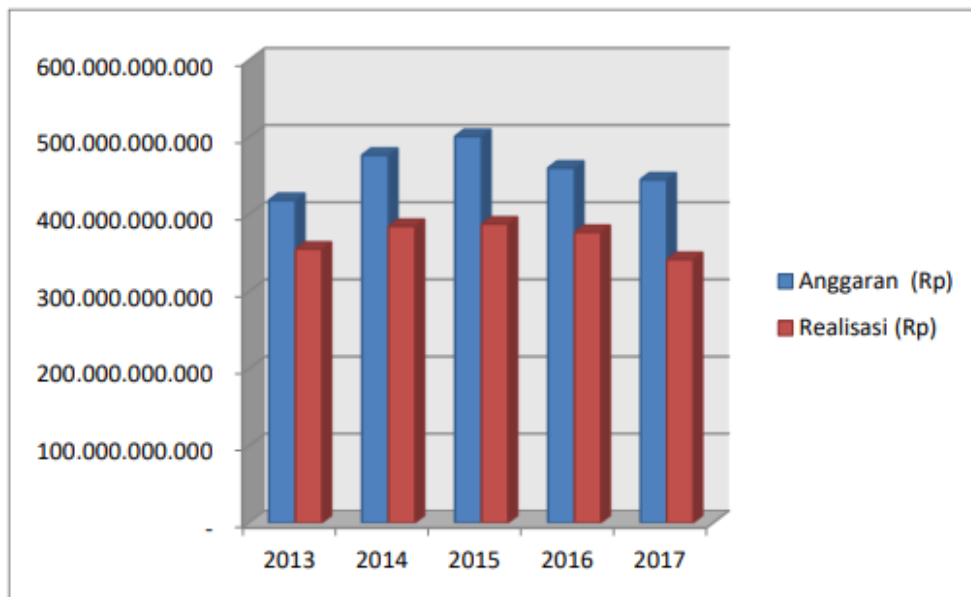
Selain itu, dana BOS yang sudah digunakan juga harus dilaporkan ke Pemerintah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*. Apabila pihak sekolah tidak mengirimkan laporan, dana BOS untuk tahap selanjutnya tidak akan disalurkan.

Daftar table2.2 pengeluaran dana bos kota cimahi

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Dana BOS	51.162.883.230
2	Dana BOS SD	36.056.731.357
3	Dana BOS SD	35.743.200.000
4	Bunga Dana BOS SD	313.531.357
5	Dana BOS SMP	15.106.151.873
6	Dana BOS SMP	13.623.000.000
7	Bunga Dana BOS SMP	1.483.151.873

Sumber : Kemendikbud.go.id

2021



Gambar 2.1 Pengeluaran Anggaran bidang Pendidikan di Disdik Cimahi

Sumber : Resntra Dinas Pendidikan kota cimahi

2020

No	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
-----------	----------------------------	------------------------	-------------------

1	<p>Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa</p>	<p>Pembelajaran Kontekstual (SMP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pendidikan karakter • Pembelajaran remedial • Pembelajaran pengayaan • Pemantapan persiapan ujian • Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, 	<ul style="list-style-type: none"> • Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP terbuka) • Biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba
2	<p>Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pendaftaran • Pengadaan formular • Administrasi pendaftaran • Pendaftaran ulang • Biaya pendataan data pokok Pendidikan • Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 	<p>Termasuk untuk konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru. Standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah</p>

			ditetapkan Pemda
3	Kegiatan Ulangan dan Ujian	<ul style="list-style-type: none"> • Ulangan harian • Ulangan umum • Ujian sekolah 	<p>Termasuk untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopy • Penggangdaan soal • Honor koreksi ujian, dan • Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
4	Perawatan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> •Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela • Perbaikan mebel, perbaikan sanitasi Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik 31 sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/ keramik dan 	Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik

		perawatan fasilitas lainnya	
5	Pembayaran honorarium bulanan, guru honorer, dan tenaga kependidikan honorer	<ul style="list-style-type: none"> • Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) • Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD) • Pegawai perpustakaan • Penjaga sekolah • Satpam • Pegawai kebersihan 	<p>Kependidikan honorer sekolah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai bidang yang diperlukan</p>
6	Pengembangan profesi guru	<ul style="list-style-type: none"> • KKG/ MGMP • KKKS/ MKKS • Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah 	<p>Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/ block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya</p>

			diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/ blockgrant tersebut.
7	Membantu siswa miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah • Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah 	
8	Pengembangan Perpustakaan	• Mengganti buku teks yang rusak/ menambah kekurangan untuk	•Perhatikan UU No43/2007 tentang Perpustakaan

		memenuhi rasio satu siswa satu buku • Langganan publikasi berkala • Akses informasi online • Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan • Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan • Pengembangan database perpustakaan • Pemeliharaan perabot perpustakaan	• Minimal 5% dari dana BOS

Tabel 2.3 Pembiayaan BOS Sekolah

Sumber :Kemendikbud.go.id

2021

2. Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Program BOS

1. UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 35
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

2.2.Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Pemaparan tentang pengelolaan dana bos sudah tertera pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 dalam peraturan tersebut memuat tentang pelaksanaan dana BOS struktur Organisasi pelaksanaan, monitoring dan supervisi, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan pengawasan pemeriksaan dan sanksi, dan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Penelitian ini dimulai dari penyusunan kebijakan pendanaan oleh sekolah yang berbentuk RAKS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) selanjutnya kepada implementasi kebijakan yang lebih menyangkut perencanaan, pelaporan, hasil dan manfaat, setelah itu adalah permasalahan, kendala yang terjadi pada penerapannya, adanya masalah adalah upaya bagi sekolah untuk

mencari cara untuk keluar dari masalah tersebut, bagaimana sekolah meminimalisir adanya kendala yang terjadi sehingga tidak menghasilkan kerugian kepada yang menerimanya

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



2.3 Proposisi

Dinas Pendidikan Kota Cimahi Melakukan Dana Bantuan Operasional dari Anggaran pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk menutupi atau membantu sekolah jenjang SMP dengan bantuan sebagai contoh Pembangunan Peralatan Sekolah dan Beasiswa yang memiliki nilai yang baik